

# NEO-LIBERAL DAN KEJAHATAN MULTILATERAL

Oleh: Bonnie Setiawan \*

Untuk memahami Globalisasi dan mekanisme dunia sekarang, orang perlu memahami Neo-Liberalisme. Inilah ideologi mutakhir kapitalisme yang saat ini sedang jaya-jayanya, terutama slogan TINA (*There is No Alternatives*) dari mulut Margaret Thatcher. Semenjak 1970-an hingga kini, Neo-Liberalisme mulai menanjak naik menjadi kebijakan dan praktek negara-negara kapitalis maju, dan didukung oleh pilar-pilar badan dunia: Bank Dunia, IMF dan WTO. Neo-Liberal tidak lain adalah antitesa *welfare state*, antitesa neo-klasik, dan antitesa Keynesian. Dengan kata lain antitesa kaum liberal sendiri, yaitu Liberal Baru atau kaum Kanan Baru (*New-Rightist*).

Dengan memahami Neo-Liberal, maka kita dapat memahami berbagai sepele terjang badan-badan multilateral dunia; kita dapat memahami perubahan kebijakan domestik di negara-negara maju; kita dapat memahami mengapa terjadi krisis moneter dan ekonomi yang tidak berkesudahan; kita dapat memahami mengapa Indonesia didikte dan ditekan terus oleh IMF; kita dapat memahami mengapa Rupiah tidak pernah stabil; kita dapat memahami mengapa BUMN didorong untuk di-privatisasi; kita dapat memahami mengapa listrik, air, BBM, dan pajak naik; kita dapat memahami mengapa impor beras dan bahan pangan lain masuk deras ke Indonesia; kita dapat memahami mengapa ada BPPN, Paris Club, Debt Rescheduling dan lain-lain; dan banyak lagi soal-soal yang membingungkan dan memperdayai publik.

Nama dari program Neo-Liberal yang terkenal dan dipraktekkan dimana-mana adalah SAP (Structural Adjustment Program). Program penyesuaian struktural merupakan program utama dari Bank Dunia dan IMF, termasuk juga WTO dengan nama lain. WTO memakai istilah-istilah seperti *fast-track*, *progressive liberalization*, *harmonization* dan lain-lain. Intinya tetap sama. Di balik nama sopan "penyesuaian struktural", adalah "penghancuran dan pendobrakan radikal" terhadap struktur dan sistem lama yang tidak bersesuaian dengan mekanisme pasar bebas murni. Neo-Liberal adalah ideologinya, dan SAP adalah praktek atau implementasinya. Sementara tujuannya adalah ekspansi sistem kapitalisme global.

## NEO-LIBERAL ATAU KANAN BARU

Sejarah Neo-Liberal bisa dirunut jauh ke masa-masa tahun 1930-an. Adalah Friedrich von Hayek (1899-1992) yang bisa disebut sebagai Bapak Neo-Liberal. Hayek terkenal juga dengan julukan ultra-liberal. Muridnya yang utama adalah Milton Friedman, pencetus monetarisme.

Kala itu adalah masa kejayaan Keynesianisme, sebuah aliran ilmu ekonomi oleh John Maynard Keynes. Keynesian dianggap berjasa dalam memecahkan masalah Depresi besar tahun 1929-1930. Terutama setelah diadopsi oleh Presiden Roosevelt dengan program "New-Deal" maupun Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia ke-II, maka Keynesian resmi menjadi mainstream ekonomi. Bahkan Bank Dunia dan IMF kala itu terkenal sebagai si kembar Keynesianis, karena mempraktekkan semua resep Keynesian. Dasar pokok dari ajaran Keynes adalah kepercayaannya pada intervensi negara ke dalam kehidupan ekonomi. Menurutnya, kebijakan ekonomi haruslah mengikis pengangguran sehingga tercipta tenaga kerja penuh (*full employment*) serta adanya pemerataan yang lebih besar. Dalam bukunya yang terkenal di tahun 1926 berjudul "*The*

---

\* Direktur Eksekutif Institute for Global Justice (IGJ)

*End of Laissez-Faire*", Keynes menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kepentingan individual yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan umum. Katanya, "Sama sekali tidak akurat untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip ekonomi politik, bahwa kepentingan perorangan yang paling pintar sekalipun akan selalu bersesuaian dengan kepentingan umum". Keynesianisme masih tetap menjadi *dominant economy* sampai tahun 1970-an.

Sementara itu neo-liberal belum lagi bernama. Akan tetapi Hayek dan kawan-kawan sudah merasa gelisah dengan mekarnya paham Keynes ini. Pada masa itu pandangan semacam neo-liberal sama sekali tidak populer. Meskipun begitu mereka membangun basis di tiga universitas utama: *London School of Economics* (LSE), Universitas Chicago, dan *Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales* (IUHEI) di Jenewa. Para ekonom kanan inilah yang kemudian setelah PD-II mendirikan lembaga pencetus neo-Liberal, yaitu *Societe du Mont-Pelerin*, Pertemuan mereka yang pertama di bulan April 1947 dihadiri oleh 36 orang dan didanai oleh bankir-bankir Swiss. Termasuk hadir adalah Karl Popper dan Maurice Allais, serta tiga penerbitan terkemuka, *Fortune*, *Newsweek* dan *Reader's Digest*. Lembaga ini merupakan "semacam *freemasonry* neo-liberal, sangat terorganisir baik dan berkehendak untuk menyebarkan kredo kaum neo-liberal, lewat pertemuan-pertemuan internasional secara reguler".

Pandangan Neo-Liberal dapat diamati dari pikiran Hayek. Bukunya yang terkenal adalah "*The Road to Serfdom*" (Jalan ke Perbudakan) yang menyerang keras Keynes. Buku tersebut kemudian menjadi kitab suci kaum kanan dan diterbitkan di *Reader's Digest* di tahun 1945. Ada kalimat di dalam buku tersebut: "Pada masa lalu, penundukan manusia kepada kekuatan impersonal pasar, merupakan jalan bagi berkembangnya peradaban, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa itu. Dengan melalui ketertundukan itu maka kita bisa ikut serta setiap harinya dalam membangun sesuatu yang lebih besar dari apa yang belum sepenuhnya kita pahami". Neo-liberal menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Regulator utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Mekanisme pasar akan diatur oleh persepsi individu, dan pengetahuan para individu akan dapat memecahkan kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi, sehingga mekanisme pasar dapat menjadi alat juga untuk memecahkan masalah sosial. Menurut mereka, pengetahuan para individu untuk memecahkan persoalan masyarakat tidak perlu ditransmisikan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam arti ini maka Neo-liberal juga tidak percaya pada Serikat Buruh atau organisasi masyarakat lainnya.

Dengan demikian Neo-liberal secara politik terus terang membela politik otoriter. Ini ditunjukkan oleh Hayek ketika mengomentari rejim Pinochet di Chili, "Seorang diktator dapat saja berkuasa secara liberal, sama seperti mungkin demokrasi berkuasa tanpa liberalisme. Preferensi personal saya adalah memilih sebuah kediktatoran liberal ketimbang memilih pemerintahan demokratis yang tidak punya liberalisme". Demokrasi politik, menurut neo-Liberal, dengan demikian adalah sistem politik yang menjamin terlaksananya kebebasan individu dalam melakukan pilihan dalam transaksi pasar, bukan sistem politik yang menjamin aspirasi yang pluralistik serta partisipasi luas anggota masyarakat. Bahkan salah seorang pentolan neo-Liberal, William Niskanen, menyatakan bahwa suatu pemerintah yang terlampaui banyak mengutamakan kepentingan rakyat banyak adalah pemerintah yang tidak diinginkan dan tidak akan stabil. Bila terjadi konflik antara demokrasi dengan pengembangan usaha yang kapitalistis, maka mereka memilih untuk mengorbankan demokrasi.

Salah satu benteng neo-liberal adalah Universitas Chicago, di mana Hayek mengajar di situ antara tahun 1950 sampai 1961, dan Friedman menghabiskan seluruh karir akademisnya. Karena itu mereka juga terkenal sebagai "*Chicago School*". Buku Friedman adalah "*The*

*Counter Revolution in Monetary Theory*", yang menurutnya telah dapat menyingkap hukum moneter yang telah diamatinya dalam berabad-abad dan dapat dibandingkan dengan hukum ilmu alam. Friedman percaya pada *freedom of choice* (kebebasan memilih) individual yang ekstrim. Dengan demikian, neo-Liberal tidak mempersoalkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Pertumbuhan konglomerasi dan bentuk-bentuk unit usaha besar lainnya semata-mata dianggap sebagai manifestasi dari kegiatan individu atas dasar kebebasan memilih dan persaingan bebas. Efek sosial yang ditimbulkan oleh kekuasaan ekonomi pada segelintir kelompok kuat tidak dipersoalkan oleh neo-Liberal. Karenanya demokrasi ekonomi tidak ada di dalam agenda kaum neo-Liberal.<sup>1</sup>

Pandangan kaum neo-Liberal pada dasarnya tidak populer di masyarakat Barat. Mereka anti terhadap *welfare state* (negara kesejahteraan) dan mereka juga anti demokrasi. Tetapi mengapa mereka bisa berjaya sekarang? Susan George menjawabnya, bahwa mereka berasal dari sebuah kelompok kecil rahasia dan mereka sangat percaya pada doktrin tersebut, yang kemudian dengan bantuan para pendananya, membangun jaringan yayasan-yayasan internasional yang besar, lembaga-lembaga, pusat-pusat riset, berbagai publikasi, para akademisi, para penulis, serta humas yang mengembangkan, mengemas dan mempromosikan ide dan doktrin tersebut tanpa henti. Kata Susan, "mereka membangun kader-kader ideologis yang luar biasa efisiennya karena mereka memahami apa yang disampaikan oleh pemikir marxis Itali Antonio Gramsci ketika ia berbicara tentang konsep hegemoni kultural. Bila kamu dapat menguasai kepala orang, maka hati dan tangan mereka akan ikut".<sup>2</sup> Salah seorang yang menjadi ujung tombaknya adalah Anthony Fisher, seorang pengusaha sukses yang kemudian mendirikan *Institute of Economic Affairs* (IEA) pada tahun 1955 dengan bantuan dana dari kaum industrialis lainnya. Tujuan lembaga ini adalah "menyebarkan pemikiran ekonomi yang kuat di berbagai universitas dan berbagai lembaga pendidikan mapan lainnya". IEA inilah yang kemudian memberi pengaruh besar kepada Margaret Thatcher, seperti dikatakan Milton Friedman, "Tanpa adanya IEA, maka saya meragukan akan bisa terjadi revolusi Thatcherite". Salah satu koran yang menjadi corong neo-Liberal di Inggris adalah *The Daily Telegraph*. Lembaga lain juga didirikan, yaitu *Centre for Policy Studies* (CPS) di tahun 1974 yang sangat berpengaruh kepada para politisi di Inggris. IEA kemudian melahirkan *Adam Smith Institute* (ASI) di tahun 1976. Kerjasama mereka dengan *Heritage Foundation*, didirikan di Washington tahun 1973 oleh lulusan LSE "guna membuat hal yang sama bagi politik Amerika yang dilakukan oleh CPS kepada politik Inggris". Anthony Fisher kemudian menjadi presiden pertama dari lembaga *Fraser Institute* di Kanada di tahun 1974. Di tahun 1977, ia mendirikan *International Centre for Economic Policy Studies* di New York, di mana salah satu pendirinya adalah Bill Casey, yang kemudian menjadi Direktur CIA. Tahun 1979, Fisher mendirikan *Institute for Public Policy* di San Francisco. Fisher juga terlibat dalam mendirikan *Centre for International Studies* (CIS) di Australia, di mana Direkturnnya Greg Lindsay merupakan kontributor penting berkembangnya ide pasar bebas di politik Australia. Dalam rangka memudahkan mengelola berbagai lembaga tersebut, Fisher mendirikan *Atlas Economic Research Foundation* yang menyediakan struktur kelembagaan pusat, yang di tahun 1991 mengklaim membantu, mendirikan, membiayai sekitar 78 lembaga serta mempunyai hubungan dengan 81 lembaga lainnya, di 51 negara. Ketika tembok Berlin rubuh, maka banyak personelnnya yang pindah ke Eropa Timur guna "merubah ekonomi-ekonomi yang sakit menjadi kapitalisme".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Eric Toussaint, *Your Money or Your Life: The Tyranny of Global Finance*, Pluto Press, 1999, hlm. 178-182; dan Sritua Arief, *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*, CIDES, 1998, hlm. 36-39.

<sup>2</sup> Susan George, "A Short History of Neoliberalism", dalam Walden Bello, Nicola Bullard, Kamal Malhotra (ed.), *Global Finance: New Thinking on Regulating Speculative Capital Markets*, Zed Books, 2000, hlm. 28-29.

<sup>3</sup> Ted Wheelwright, "How neo-Liberal Ideology Triumphed", *Third World Resurgence*, No. 99/1998, hlm. 11-12.

Para ekonom neo-Liberal di tahun 1970-an berhasil menembus dominasi ilmu ekonomi. Di tahun 1974, Hayek dianugerahi Nobel Ekonomi. Sesudahnya Friedman mendapat Nobel Ekonomi di tahun 1976. Juga Maurice Allais, seorang anggota Mont-Pelerin Society, mendapat Nobel Ekonomi di tahun 1988. Sejak tahun 1970-an, neo-Liberal mulai berkibar. Sejak itu pulalah seluruh paradigma ekonomi secara perlahan masuk ke dalam cara berpikir neo-Liberal, termasuk ke dalam badan-badan multilateral, Bank Dunia, IMF dan GATT (kemudian menjadi WTO).

Dengan demikian Margaret Thatcher menjadi pengikut dari Hayek, sedangkan murid dari Friedman adalah Ronald Reagan. Inilah yang menghantar neo-Liberal menjadi ekonomi mainstream di tahun 1980-an lewat *Thatcherism* dan *Reaganomics*. Thatcher sebenarnya adalah seorang *social-darwinist*, sampai akhirnya ia menemukan buku Hayek, dan kemudian menjadi salah satu pengikutnya. Doktrin pokok dari Thatcher adalah paham kompetisi – kompetisi di antara negara, di antara wilayah, di antara perusahaan-perusahaan, dan tentunya di antara individu. Kompetisi adalah keutamaan, dan karena itu hasilnya tidak mungkin jelek. Karena itu kompetisi dalam pasar bebas pasti baik dan bijaksana. Kata Thatcher suatu kali, “Adalah tugas kita untuk terus mempercayai ketidakmerataan, dan melihat bahwa bakat dan kemampuan diberikan jalan keluar dan ekspresi bagi kemanfaatan kita bersama”. Artinya, tidak perlu khawatir ada yang tertinggal dalam persaingan kompetitif, karena ketidaksamaan adalah sesuatu yang alamiah. Akan tetapi ini baik karena berarti yang terhebat, terpandai, terkuat yang akan memberi manfaat pada semua orang. Hasilnya, di Inggris sebelum Thatcher, satu dari sepuluh orang dianggap hidup di bawah kemiskinan. Kini, satu dari empat orang dianggap miskin; dan satu anak dari tiga anak dianggap miskin. Thatcher juga menggunakan privatisasi untuk memperlemah kekuatan Serikat Buruh. Dengan privatisasi atas sektor publik, maka Thatcher sekaligus memperlemah Serikat-Serikat Buruh di BUMN yang merupakan terkuat di Inggris. Dari tahun 1979 sampai 1994, maka jumlah pekerja dikurangi dari 7 juta orang menjadi 5 juta orang (pengurangan sebesar 29%). Pemerintah juga menggunakan uang masyarakat (para pembayar pajak) untuk menghapus hutang dan merekapitalisasi BUMN sebelum dilempar ke pasar. Contohnya Perusahaan Air Minum (PAM) mendapat pengurangan hutang 5 milyar pounds ditambah 1,6 milyar pounds dana untuk membuatnya menarik sebelum dibeli pihak swasta. Demikian pula di Amerika, kebijakan neo-Liberal Reagan telah membawa Amerika menjadi masyarakat yang sangat timpang. Selama dekade 1980an, 10% teratas meningkat pendapatannya 16%; 5% teratas meningkat pendapatannya 23%; dan 1% teratas meningkat pendapatannya sebesar 50%. Ini berkebalikan dengan 80% terbawah yang kehilangan pendapatan; terutama 10% terbawah, jatuh ke titik nadir, kehilangan pendapatan 15%.<sup>4</sup>

Sejak 1980-an pula, bersamaan dengan krisis hutang Dunia Ketiga, maka paham neo-Liberal menjadi paham kebijakan badan-badan dunia multilateral Bank Dunia, IMF dan WTO. Tiga poin dasar neo-Liberal dalam multilateral ini adalah: pasar bebas dalam barang dan jasa; perputaran modal yang bebas; dan kebebasan investasi. Sejak itu Kredo neo-Liberal telah memenuhi pola pikir para ekonom di negara-negara tersebut. Kini para ekonom selalu memakai pikiran yang standard dari neo-Liberal, yaitu deregulasi, liberalisasi, privatisasi dan segala jampi-jampi lainnya. Kaum mafia Berkeley UI yang dulu neo-klasik, kini juga berpindah paham menjadi neo-liberal.

---

<sup>4</sup> Susan George, *Ibid.*, hlm. 29-31.

## NEO-LIBERAL DALAM MULTILATERALISME

Poin-poin pokok neo-Liberal dapat disarikan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. ATURAN PASAR. Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.
2. MEMOTONG PENGELUARAN PUBLIK DALAM HAL PELAYANAN SOSIAL. Ini seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk 'jaring pengaman' untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak (*tax benefits*) untuk kalangan bisnis.
3. DEREGULASI. Mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.
4. PRIVATISASI. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.
5. MENGHAPUS KONSEP BARANG-BARANG PUBLIK (*PUBLIC GOODS*) ATAU KOMUNITAS. Menggantinya dengan "tanggungjawab individual", yaitu menekan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program di Bank Dunia dan IMF ini, maka program neo-Liberal, mengambil bentuk sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Paket kebijakan *Structural Adjustment* (Penyesuaian Struktural), terdiri dari komponen-komponen: (a) Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga *public utilities*, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji.
2. Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena dianggap telah mendistorsi pasar; (b) privatisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.
3. Paket kebijakan yang direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya nilai tukar mata uang terhadap dollar AS, yang merupakan gabungan dua paket di atas ditambah tuntutan-tuntutan spesifik disana-sini.

Di Indonesia, paham neo-liberal mulai terasa pengaruhnya di tahun 1980-an, ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dan ekonomi, yang berujud dalam berbagai paket deregulasi semenjak tahun 1983. Paralel dengan masa itu adalah terjadinya krisis hutang dunia Ketiga di tahun 1982, ketika Mexico default. Setelah itu Bank Dunia dan IMF masuk ke dalam perekonomian negara-negara yang terkena krisis hutang lewat perangkat SAP. Saat itu terutama di negara-negara Amerika Latin dan Afrika.

---

<sup>5</sup> Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia, "What is Neo-Liberalism?", Third World Resurgence No. 99/1998, hlm. 7-8.

<sup>6</sup> Arief, Op.cit., hlm. 360-367.

Indonesia belumlah terkena krisis, dan karenanya jauh dari hiruk-pikuk SAP. Akan tetapi sejak itu jelas pola pembangunan Indonesia mulai mengadopsi kebijakan neo-liberal, khususnya karena keterikatan Indonesia kepada IGGI, Bank Dunia dan IMF. Beberapa kebijakan pada saat itu, yang membuat Indonesia semakin terbuka kepada kapitalisme global, secara ringkasnya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Di bidang moneter dan keuangan:

Pada bulan Maret 1983, dilakukan devaluasi terhadap rupiah sebesar 28%. Kemudian sejak Juni 1983, dimulai deregulasi perbankan dengan menghapus kontrol atas suku bunga dan pagu kredit. Di bulan Oktober 1986, pemerintah menghapus pagu swap pada BI. Tanggal 12 September 1986, dilakukan kembali devaluasi atas rupiah sebesar 31%. Setelahnya, tanggal 27 Oktober 1988 (terkenal dengan Pakto—paket Oktober) pemerintah memberi keleluasaan untuk pendirian bank baru, termasuk bank patungan, dengan menurunkan *reserve requirement* dari 15% menjadi 2%, dan memperlakukan peraturan *lending limit*. Pada Desember 1987, pemerintah memperbaiki fungsi pasar modal Jakarta dan dibentuknya pasar paralel. Selanjutnya di bulan Desember 1988, diadakan deregulasi pasar modal dan jasa finansial. Tanggal 25 Maret 1989, follow-up Pakto 1988.

2. Di bidang fiskal:

Di tahun 1984, dimulai reformasi perpajakan dengan pengenaan PPh (pajak penghasilan). Tahun 1985, diperkenalkan pajak pertambahan nilai. Tahun 1986, digantinya IPEDA dengan pajak bumi dan bangunan (PBB)

3. Di bidang perdagangan

Pada bulan Maret 1985, diadakan pengurangan tarif dari 0-225% tinggal menjadi 0-60%. Selanjutnya dikeluarkan Inpres no. 4/1985 yang mengganti peran bea cukai oleh SGS dari Swiss. Bulan Mei 1986 (dikenal dengan Pakem) dilakukan perbaikan *duty drawback* dan upaya agar eksportir mendapatkan input dengan harga internasional. Pada bulan Oktober 1986, dilakukan perubahan dari lisensi impor menjadi impor umum, penghapusan *non-trade barrier* (NTB) dan penurunan tarif lebih lanjut. Bulan Januari 1987, kembali beberapa perubahan lisensi impor menjadi impor umum. Selanjutnya Juli 1987, dilakukan simplifikasi kuota tekstil. Pada bulan Desember 1987, diadakan deregulasi lebih lanjut tentang sistem impor dan ekspor serta investasi bagi asing. Di bulan November 1988, penghapusan monopoli impor (plastik dan baja) dan deregulasi angkutan laut antar pulau. Pada Januari 1989, diperkenalkan '*Harmonized System of Trade Classification*'. Kemudian pada Mei 1990, dilakukan penghapusan NTB lebih lanjut menjadi tarif, deregulasi farmasi dan peternakan.

4. Di bidang investasi:

Pada bulan Mei 1986, 95% pemilikan asing dimungkinkan untuk melakukan investasi berorientasi ekspor. Perusahaan yang berorientasi ekspor diizinkan mendistribusikan produknya di dalam negeri dan perusahaan patungan dapat memperoleh kredit ekspor dari pemerintah. Kemudian tanggal 23 Oktober 1993 dikeluarkan Pakto 1993, yaitu paket deregulasi sektor riil, diantaranya izin investasi langsung dapat diurus di tingkat kabupaten dan kotamadya dan penghapusan berbagai surat dan persetujuan. Setelahnya dikeluarkan PP 20/1994 tanggal 2 Juni 1994, yang sangat liberal, yaitu dibolehkannya pemilikan modal asing sampai dengan 95-100%, termasuk penguasaan atas sarana hajat hidup orang banyak, seperti pelabuhan, tenaga listrik, kereta api, pembangkit tenaga nuklir dan media massa.

---

<sup>7</sup> Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP-AMN-YKPN, Yogya, 1987, hlm.374-376; Panji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm 157-175.

Liberalisasi di masa Orde Baru tersebut, meski demikian, merupakan juga alat bagi kroni-kroni Suharto dan keluarganya untuk menguasai perekonomian. Dengan demikian liberalisasi tersebut pada dasarnya mengukuhkan struktur konglomerasi yang mampu menguasai berbagai sektor ekonomi dari hulu sampai hilir di tangan segelintir kelompok pengusaha. Bagi neo-Liberalisme, dalam hal ini Bank Dunia dan IMF, hal ini tidaklah mengganggu. Kapitalisme dapat bersesuaian dengan otoriterisme, dan malahan merupakan pilihan terbaik, sebagaimana resep kaum neo-Liberal. Karena itulah Indonesia selalu mendapat puja-puji dari para pejabat Bank Dunia dan IMF. Indonesia dianggap sebagai contoh keberhasilan, sebagai “good-boy”, dinaikkan derajadnya menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah-bawah, dan digolongkan sebagai NICs (*New Industrialized Country*) baru, sebagai ‘Macan Asia’ bersama-sama Thailand, Malaysia dan Filipina. Bahkan laporan Bank Dunia di awal tahun 1997, masih memuja-muji ekonomi Indonesia dan menyatakannya sebagai contoh yang paling baik dengan fundamental ekonomi yang bagus pula.

Tidak dinyana terjadilah krisis moneter Juli 1997, yang dimulai dari Thailand. Kini mulailah Indonesia masuk ke dalam krisis berkepanjangan yang tidak berkesudahan hingga kini. Sejak itu dimulailah babak baru ekonomi politik pembangunan Indonesia, yaitu Indonesia masuk ke dalam skema SAP dari Bank Dunia dan IMF. SAP bertujuan: (1) menurunkan inflasi; (2) menurunkan defisit anggaran; (3) memacu ekspor; dan (4) membuat jadwal pembayaran hutang luar negeri lancar. Untuk itu, pemerintah harus melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) devaluasi mata uang; (b) deregulasi sektor keuangan; (c) pemotongan subsidi; (d) menjual perusahaan publik, yaitu privatisasi BUMN; (e) memotong anggaran sosial dan tenaga kerja; (f) liberalisasi sektor perdagangan; dan (g) penurunan upah. Dengan melihat lingkup bidang SAP, maka hampir seluruh sektor penting harus direstrukturisasi. Ini nampak sekali di dalam isi *Letter of Intent* dan Memorandum yang menyertainya, yang mengatur hampir seluruh sektor yang ada, mulai dari sektor perbankan, sektor pengairan, sektor *utilities* (listrik, air dan energi) dan banyak lainnya. Sebenarnya skema SAP di Indonesia sudah mirip dengan ESAF (*Enhanced Structural Adjustment Facility* – kemudian berubah menjadi PRGF – *Poverty Reduction Growth Facility*), sebuah skema SAP bagi negara-negara LDC (miskin). Mengingat Indonesia masih tidak bisa dikategorikan miskin, maka diadakan modifikasi. Sementara itu Bank Dunia mulai memasukkan komponen pinjamannya dengan SAP, yaitu lewat SSNAL (*Social Safety-Net Adjustment Loan*) dan PRSL (*Policy Reform Structural Loan*). Selain itu Bank Dunia juga memberikan pinjaman secara sektoral, yaitu lewat *Sectoral Adjustment Loan* (SECAL), yaitu program SAP untuk sektor-sektor tertentu. Ini merupakan program baru dari Bank Dunia yang diturunkan bila suatu negara dianggap tidak layak secara ekonomi dan politik. SECAL di Indonesia diberikan pada sektor pengairan (WATSAL-*Water Sectoral Adjustment Loan*) dan dalam waktu dekat untuk sektor pertanian, dan kemudian menyusul pada sektor perdagangan, industri dan energi. Sementara ADB memberikan SECAL untuk sektor-sektor listrik, kesehatan dan gizi, komunitas, pemerintahan daerah, deregulasi usaha menengah, dan pemberantasan korupsi di BUMN.

Seluruh skema SAP yang disodorkan Bank Dunia-IMF kini telah merubah Indonesia menjadi hamba sahaya saja dari badan-badan tersebut. Terutama skema dari IMF, dipandang merupakan pendiktean luar biasa kepada pemerintah Indonesia. Kini nakhoda kapal Indonesia sudah disetir oleh IMF. Segala hal harus melalui ijin dan sepengetahuan IMF, dan IMF punya kewenangan untuk menolaknya. Contoh-contoh tersebut misalnya pada Undang-Undang bank Indonesia dan penggantian Gubernur Bank Indonesia, di mana pemerintah sampai mengiba-iba untuk mendapat ijin dari IMF. Begitupun IMF tetap ngotot dan keras agar Indonesia tetap pada rejim devisa bebas dan rejim nilai tukar mengambang-bebas. Segala hal yang mengarah pada dua hal tersebut akan selalu di-veto oleh IMF. Padahal masalah paling dasar dari krisis Indonesia adalah tidak terkendalinya nilai tukar Rupiah,

hanya karena sensitivitas pasar pada kejadian sehari-hari. Kehidupan rakyat Indonesia telah dikurbankan untuk kepentingan mekanisme pasar dan spekulasi-spekulasi mata uang.

## KEGAGALAN DAN KEJAHATAN IMF

Dalam hal ini patut diketengahkan peran dari IMF. IMF kiranya dapat digambarkan sebagai Kopasus-nya globalisasi. IMF disebut juga sebagai 'Advance-Guard' (pasukan garis depan) WTO. Mengapa? Karena WTO dan IMF mempunyai tujuan yang sama, yaitu perdagangan bebas. Untuk itu IMF akan selalu bergerak cepat mendahului perjanjian-perjanjian yang diatur WTO. Ini nampak dalam isi *Letter of Intent* yang memintakan diadakannya liberalisasi perdagangan lebih cepat dan penurunan tarif drastis ketimbang yang dituntut di WTO. Seluruh liberalisasi yang tercakup di dalam Lol, mendahului komitmen di dalam WTO.

Paket kebijakan yang disodorkan IMF kepada Indonesia adalah paket standard yang diberlakukan di berbagai negara lainnya yang mendapatkan SAP. Paket tersebut terdiri dari komponen-komponen berikut ini:<sup>8</sup>

1. Mengembalikan mekanisme pasar bebas sebagai penentu pembentukan harga barang dan jasa dan sebagai proses pengalokasian sumber-sumber ekonomi ke tingkat yang optimal, atau disebut *allocative efficiency*.
2. Swastanisasi seluas-luasnya dalam ekonomi. Ini berarti penguasaan pemerintah dalam aset ekonomi dan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, termasuk pembangunan prasarana publik, akan diminimumkan.
3. Pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal yang kontraktif dengan tujuan mencegah meningkatnya inflasi. Kebijakan moneter yang kontraktif berbentuk pengetatan kredit dan penganan tingkat bunga yang relatif tinggi sebagai akibat liberalisasi keuangan. Kebijakan fiskal yang kontraktif mengambil bentuk pengurangan atau penghapusan subsidi.
4. Segala bentuk proteksi dihapuskan dan liberalisasi impor dilaksanakan demi menimbulkan daya saing dan efisiensi unit-unit ekonomi domestik. Liberalisasi impor dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Putaran Uruguay.
5. Memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas yang lebih luas dan liberal ke seluruh sektor ekonomi dalam berbagai skala investasi (kecil, menengah dan besar). Ketentuan-ketentuan yang membatasi pemilikan asing dihapuskan sehingga dominasi pihak asing dalam pemilikan sosial unit-unit ekonomi, baik di sektor swasta maupun di sektor publik harus dibenarkan atas dasar landasan ideologi globalisasi modal, pertukaran dan produksi (*internationalization of capital, exchange and production*).
6. Butir-butir lain-lain, yang sudah lama direkomendasikan oleh orang Indonesia sendiri, seperti pembubaran BPPC, penghapusan larangan membeli dan menyewa kapal-kapal bekas (terutama untuk pencarian ikan), penghapusan monopoli BULOG dalam komoditi-komoditi tertentu, penghapusan paksaan kepada petani untuk menanam tebu, pencabutan fasilitas pajak maupun jaminan kredit untuk proyek Mobnas, dan penghapusan dukungan pemerintah untuk proyek IPTN.

Sritua Arief menyatakan bahwa ini adalah standar neo-liberal yang berlawanan dengan kepentingan rakyat Indonesia. **Pertama**, *Allocative efficiency*, di tengah kepincangan yang menyolok dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, maka mekanisme pasar akan mengakomodasikan preferensi orang-orang kaya. Ini artinya sumber-sumber ekonomi akan dialokasikan untuk memproduksi barang-barang mewah atas korban produksi barang-barang kebutuhan pokok. **Kedua**, apa yang disebut privatisasi, menurut Sritua, mengandung unsur ideologis yang sangat berbahaya, karena dimaksudkan terjadi perubahan distribusi

---

<sup>8</sup> Sritua Arief, Op.cit., hlm. 374-379

kekayaan dan kekuasaan politik untuk memperkuat posisi kelompok kaya, kalangan bisnis besar dan para penghisap dan pemupuk rente ekonomi atas korban masyarakat bawah. Terjadi situasi *self-reinforcing* antara jaringan kekuasaan ekonomi dengan jaringan kekuasaan politik. Masuknya unsur-unsur asing berkolaborasi dengan para kompradornya di Indonesia akan menjerumuskan Indonesia kembali menjadi negeri koloni asing. **Ketiga**, kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencegah peningkatan inflasi seolah terdapat “*excess demand*” dalam ekonomi Indonesia menjadi paradoksal dengan kebijakan fiskal yang justru mendorong inflasi melalui kenaikan biaya. **Keempat**, dalam hal liberalisasi impor, IMF pura-pura tidak tahu bahwa negara-negara di dunia ini ada yang kuat dan yang lemah. Yang kuat menjadi *price maker*, dan yang lemah menjadi *price taker*. Contohnya, produk-produk pertanian asing yang masuk ke negara-negara berkembang diproduksi dalam skala besar sehingga menimbulkan manfaat skala ekonomi yang tinggi, sementara produk pertanian di negara-negara berkembang masih diproduksi secara kecil-kecilan sehingga belum meraih manfaat skala ekonomi. Tentu saja dalam situasi ini, produk-produk pertanian domestik akan kalah bersaing dengan produk-produk dari negara maju. Apalagi di negara maju mereka masih terus memperoleh subsidi secara terselubung. **Kelima**, dalam hal arus masuk investasi asing, maka Indonesia tidak bisa melarang jika orang asing memperkuli pengukir-pengukir perabot Jepara, memperkuli penenun-penenun tenunan Bali, dan memperbudak pembuat-pembuat keramik gabah di Kasongan. Permintaan IMF untuk menghapus larangan investor asing memasarkan sendiri produk-produknya, akan berarti mempersempit kesempatan kalangan domestik dalam kegiatan jasa distribusi. Sritua juga melihat ada butir-butir IMF yang mengenai program-program pemerataan dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi pengalaman pelaksanaan paket IMF di seluruh negara berkembang menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program ini sangat tidak efektif, karena tetap berdasar pada strategi *redistribution from growth*. Hal ini tidak untuk memecah tembok-tembok struktur monopoli dan oligopoli, melainkan malahan akan memperkokoh dan memperluas struktur tersebut selama unsur-unsur asing diikutsertakan secara substansial. Demikianlah kritik tajam dari Sritua.<sup>9</sup>

Di lain pihak, dana pinjaman yang diorganisir IMF sebesar US\$ 43 milyar, disebutkan sebagian besar akan digunakan untuk membiayai defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran. Ini artinya, menurut Sritua, sebagian besar akan digunakan untuk membiayai kepentingan asing dalam impor, repatriasi keuntungan investasi asing, bunga hutang luar negeri, dan jasa-jasa asing lainnya. Jadi hutang ini kembali dinikmati oleh pihak asing dan bebannya ditanggung rakyat Indonesia. Ini sama dengan penggunaan pinjaman dari ADB untuk Indonesia sebesar US\$ 1,5 milyar, di mana sebesar US\$ 1,4 milyar harus digunakan untuk impor. Kata Sritua, “Sungguh ketololan luar biasa jikalau pemerintah Indonesia mengucapkan ‘matur nuwun’ atau ‘hatur nuhun’ kepada IMF”. Demikian pula keadaan yang sama berlaku untuk pinjaman CGI. Adalah naif pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh pinjaman akan masuk menjadi penerimaan dalam APBN dan akan dikonversikan ke Rupiah sehingga Rupiah membanjir. Sebagaimana diketahui ada tiga komponen pokok dalam pinjaman CGI, yaitu pinjaman program, *technical assistance* dan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa. Pinjaman program terdiri dari nilai barang-barang keperluan proyek yang diimpor dari negara kreditor, di mana nilai sebenarnya kita tidak tahu. *Technical assistance* adalah nilai jasa-jasa asing, yaitu para konsultan asing yang bergentayangan di Indonesia dan pembayaran atas jasa-jasa para birokrat asing yang mengelola pinjaman. Sedangkan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa masuk menjadi cadangan pinjaman (*borrowed reserve*) di Bank Indonesia dan terbenam di sana. Arti ini semua, katanya, adalah Indonesia kembali di bawah kekuasaan asing!<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sritua Arief, *Ibid.*

<sup>10</sup> Sritua Arief, *Ibid.*, hlm. 383-384.

Dengan memahami kritik Sritua atas IMF, makin jelas bahwa IMF mempunyai kepentingannya sendiri atas Indonesia, dengan justifikasi SAP-Lol yang seolah-olah mau menyelamatkan Indonesia dari krisis, nyatanya mau melakukan rekolonialisasi. Dalam kenyataannya reputasi dan legitimasi IMF sebenarnya sudah turun rendah sekali. IMF sudah lama dikritik, sejak developmentalisme, dan kini dengan neo-liberalismenya. Kritik tersebut disampaikan bukan saja dari kalangan negara berkembang, akan tetapi bahkan dari kalangan masyarakat di negara maju sendiri. Menurut catatan *Development GAP* pada tahun 1998, sebuah Ornop yang berbasis di Washington, sejak 20 tahun terakhir IMF telah merawat pasien-pasiennya sebanyak 83 negara dengan program SAP. Hasilnya malah menimbulkan banyak masalah. Pengangguran meningkat, ekonomi semakin tidak merata, kemiskinan meningkat, harga-harga naik, produksi pangan per-kapita turun, hutang meningkat, pajak mencekik, subsidi untuk orang miskin dihapuskan, dan negara tidak lagi melayani rakyatnya, karena BUMN-BUMN strategis diswastanisasi. Jadi Indonesia adalah pasiennya yang terakhir yang kini sedang sekarat, justru karena mendapat perawatan. Indonesia adalah negara terbesar kedua yang mendapat paket penyelamatan ekonomi IMF setelah Rusia. Dan kedua negara ini sekarang menjadi contoh jelas dari kegagalan operasi penyelamatan IMF yang tidak berkesudahan hingga kini.

Contoh paling jelas dari tidak becusnya IMF sebenarnya datang langsung dari kritik Kongres Amerika sendiri, yaitu lewat Komisi Meltzer (dipimpin oleh ekonom Alan Meltzer) yang di tahun 1998 telah mengkritik kecerobohan IMF dalam menjalankan peran penyelamatnya di dalam krisis Asia. Kongres Amerika telah mengkritik adanya peran IMF yang mengakibatkan terjadinya krisis utang tersebut. Malahan beberapa anggota Kongres mempertanyakan kembali perlu tidaknya keberadaan IMF. Bahkan studi internal di dalam tubuh IMF sendiri telah mengkritik keras kebijakan IMF karena penanganannya yang salah atas krisis di Meksiko dan Indonesia. Studi ini tidak pernah dikeluarkan kepada publik oleh IMF, bahkan juga tidak kepada Kongres Amerika.

Kritik pedas bahkan datang dari seorang kepala ekonomi Bank Dunia yang sekaligus juga pernah sebagai kepala penasihat ekonomi presiden Clinton, yaitu Joseph Stiglitz. Secara terbuka Stiglitz dalam sebuah majalah konservatif *The New Republic* menyerang kebijakan IMF dalam menangani krisis, yang dikatakannya hanya memakai resep yang itu-itu juga dalam menangani krisis Asia. Bahkan secara sinis, Stiglitz menyebut mereka memakai cara "copy" dan "paste" saja dalam membuat kebijakannya, yaitu mengambil saja mentah-mentah resep di negara lain untuk dipaksakan digunakan di negara lainnya lagi. Bahkan karena kesalnya ia pada orang-orang IMF yang keras kepala dan tidak mau dinasehati, ia menyebut mereka sebagai para ekonom kelas dua atau tiga yang lebih bodoh dari para ekonom pemerintahan yang ditanganinya. Pantas Stiglitz kini sangat tidak disukai oleh IMF dan kemudian dikeluarkan dari Bank Dunia karena menggoncang status-quo multilateralisme. Akan tetapi ternyata bukan hanya Stiglitz saja yang punya pandangan demikian. Kini bahkan ekonom terkemuka dari Universitas Columbia, Jagdish Bhagwati, seorang penyeru pasar bebas yang utama, bahkan ikut menyatakan keberatannya terhadap IMF. Kontrol modal yang selalu menjadi benteng kebijakan IMF kini dikritik oleh Bhagwati, yang menyatakan bahwa krisis Asia tidak bisa lepas dari hilangnya kemampuan negara-negara tersebut dalam mengontrol pinjaman-pinjaman jangka pendek yang luar biasa besarnya. Krisis Asia terutama karena tiadanya kontrol modal, katanya.

Kritik bertubi-tubi terhadap IMF, juga datang tidak lain dari sebuah universitas kondang di Amerika, *Harvard Institute of International Development*, yaitu lewat dedengkotnya, Jeffrey Sachs dan Steve Radelet. Mereka juga menyatakan kritik yang serupa. Bahkan Sachs sangat tajam mengkritik IMF dengan kata-katanya, "penyakit typhus yang membawa resesi dari satu negara ke negara lain" Bahkan kini serangan paling tajam datang langsung dari ekonom pengemuka globalisasi itu sendiri, yaitu Paul Krugman, yang kemudian menulis di

majalah *Fortune* tentang perlunya kembali ke restriksi (kekangan) atas nilai tukar, yang kemudian diadopsi oleh Malaysia.

Bukti apalagi yang dibutuhkan oleh IMF mengenai kegagalannya? Bukti yang paling nyata adalah apa yang kini terjadi antara IMF dengan Indonesia. Kasus Indonesia sebenarnya merupakan kasus kuat dari begitu serampangnya dan begitu tidak bertanggungjawabnya IMF terhadap sebuah negara. Theo Toemion dari Fraksi PDIP telah lama menyerang kegagalan IMF ini, yang sayangnya kurang didengar oleh para ekonom dan politisi kita. Khususnya geng mafia Berkeley dari Universitas Indonesia yang sangat pro-IMF lewat Sadli dan Emil Salim. Begitu pula kini dilanjutkan oleh generasi mudanya, ekonom-ekonom UI seperti Sri Mulyani yang adalah 'darling'-nya IMF (istilah dari Bung Hartojo Wignjowijoto) serta Faisal Basri yang penganut neo-liberal. Merekalah penjaga-penjaga kepentingan IMF di Indonesia. Apalagi setelah pemerintahan Gus Dur tidak lagi memakai mereka karena perbedaan visi.

Kritik paling pedas buat IMF datang dari HMT Oppusunggu, lewat gugatannya kepada IMF di bukunya "Berhentilah Bicara, Seruan Bagi Ekonom Indonesia".<sup>11</sup> Ia bahkan telah membawa IMF ke pengadilan internasional (*International Court of Justice*) di Den Hague, Belanda. Menurutnya IMF telah melakukan kejahatan moneter dan malpraktek moneter terhadap Indonesia. IMF ditudingnya telah menyetir berbagai tindakan Bank Indonesia yang justru memicu krisis yang tidak berkesudahan di Indonesia. IMF adalah aktor intelektual dari kejahatan moneter Bank Indonesia. Oppusunggu menduga, justru ada udang di balik batu dari semua tindakan IMF tersebut, yaitu menjalankan "*beggar-thy-neighbour policy*", yaitu kebijakan yang menjerat suatu negara kepada kemiskinan terus menerus sehingga tergantung kepadanya.

Hal ini sama dengan apa yang ditulis oleh Jeffrey Winters di Kompas (14 April 2001). Winters justru menduga ada sesuatu yang mencurigakan dari operasi IMF di Indonesia. Dia menyatakan adanya otokritik Dewan Eksekutif IMF bulan lalu terhadap pendekatan yang dilakukan IMF dalam menerapkan *conditionalities* (persyaratan-persyaratan). Akan tetapi petunjuk tersebut tidak berlaku untuk Indonesia. Mengapa? Winters menjawab, karena IMF khawatir terbongkarnya segala kebobrokan yang terjadi di Bank Indonesia dapat berakibat negatif bagi kewibawaan IMF. Ini adalah jawaban yang jelas dari kekisruhan yang terus terjadi di BI. Oppusunggu dan Winters bisa mencium adanya skandal di BI yang dibekingi IMF, yang sebenarnya juga skandal politik Golkar. Karena itulah pemerintahan Gus Dur diserang lebih dulu, dan Sayhriil Sabirin dijadikan seolah-olah sebagai pahlawan. Runyamnya IMF adalah juga karena runyamnya politik Indonesia. Kemacetan Undang-Undang Bank Sentral tidak lain karena IMF tidak rela cengkeramannya terhadap BI dikurangi.

Sebenarnya itulah pula sebabnya sejak September 2000 lalu IMF tidak juga mau mencairkan dananya yang 400 juta dollar, karena IMF terus menekankan kepentingannya atas Bank Indonesia, yang merupakan kunci juga bagi kontrol modal. Tidak salah kalau pemerintah Indonesia masih terus berdebat agar pemerintah punya kuasa atas BI. Rizal Ramli juga menyatakan agar IMF tak lagi mengulangi kesalahan masa lalunya di tahun 1997, yaitu dengan terapi moneter yang salah (Kompas, 15 April 2001). Nampaknya pemerintah sedang mencoba bertahan dari berbagai manuver IMF yang terus mau menancapkan kukunya di Indonesia.

Kini saatnya orang-orang Indonesia menyadari bahwa IMF-lah yang sesungguhnya merupakan biang keladi krisis Indonesia. Sejak Oktober 1997 (terbitnya *Letter of Intent*)

---

<sup>11</sup> HMT Oppusunggu, *Berhentilah Bicara! Seruan bagi Ekonom Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000

hingga April 2001 IMF tidak juga mendatangkan kesembuhan. Artinya IMF sebenarnya sudah gagal. Percuma menyandarkan pada IMF. Alih-alih menyembuhkan, nyatanya IMF telah memotong-motong badan pasiennya, hingga kita sekarat luar biasa. Utang yang bertambah US\$ 43 milyar tidak jatuh ke rakyat Indonesia, tapi untuk membayar kreditor asing dan utang kroni-kroni Suharto untuk menjadi beban rakyat Indonesia. Sayangnya orang Indonesia selalu dikibuli oleh ekonom-ekonom kesayangan IMF yang terus menerus bilang supaya patuh pada IMF dan kehendak pasar; kalau tidak ada IMF, maka matilah ekonomi kita. Jadi seperti budak saja, sudah diinjak kepalanya masih merasa bersyukur. Nampaknya kita sebagai bangsa Melayu sudah kalah harga diri ketimbang Malaysia, yang dengan penuh martabat menolak bantuan IMF dan terbukti berhasil keluar dari krisis.

## **APA SELANJUTNYA?**

Setelah memahami dan mengetahui ideologi dan praktek jahat neo-liberalisme dan Bank Dunia-IMF, maka apa yang kiranya perlu dilakukan. Bagi saya, pemahaman tersebut akan membawa kita untuk mencari jawaban alternatif lain. Masih banyak berbagai pemikiran yang bisa kita ambil untuk mencari jawaban dari persoalan yang dibawa oleh neo-liberalisme. Selain itu, kita juga mulai berupaya untuk mendekonstruksi Bank Dunia dan IMF, menggugat keberadaan mereka, dan mengenyahkan mereka karena ketidakbecusannya, arogansinya, dan neo-kolonialismenya. Jangan pernah berpikir sedetikpun bahwa mereka adalah penyelamat dan mau memberikan bantuan. Pikiran yang menggantungkan pada Bank Dunia dan IMF adalah pikiran seorang budak atau pengemis, biarpun dia mengaku sebagai ekonom kelas wahid atau pemikir hebat. Pikiran kita harus dicurahkan untuk membuat strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk melepaskan diri dari cengeraman badan-badan dunia tersebut. Selain itu masyarakat harus terus digugah dan dididik untuk mulai menjalankan pembangunan dari kemampuan diri sendiri. Indonesia juga harus belajar banyak pada negara-negara yang sanggup berdikari, seperti dengan Jepang, RRC, Iran, Libya, Kuba dan lain-lain. Selanjutnya juga mendorong solidaritas antar negara-negara Dunia Ketiga untuk menghadapi hegemoni negara-negara maju. Untuk itu, saya ingat sikap juang Bung Karno. Ketika di tahun 1960-an, Bank Dunia dan IMF mau masuk ke Indonesia dan mulai minta macam-macam, maka Bung Karno menjadi kesal. Itulah akhirnya yang membuatnya mengucapkan kata-kata: *Go to Hell with your Aid!* Setidaknya Bung Karno benar, tidak mau ada penjajahan kedua kalinya. Kita juga tidak! \*\*\*